

**PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI
PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

TESIS

Oleh

**ROLAS JAKSON
(2402198005)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PIDANA DENDA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* BAGI PENGUSAHA YANG
TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

ROLAS JAKSON

(2402198005)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rolas Jakson
NIM : 2402198005
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Januari 2026



ROLAS JAKSON
NIM 2402198005



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**"PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI PENGUSAHA
YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN"**

Oleh:

Nama : Rolas Jakson
NIM : 2402198005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NUPTK: 6450740641130042

Pembimbing II

Dr. Armuntano Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NUPTK: 6443754655130123

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Pjs Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 27 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rolas Jakson
NIM : 2402198005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.

Sebagai Ketua

2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA

Sebagai Anggota

Jakarta, 27 Januari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rolas Jakson

NIM : 2402198005

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM
REMEDIMUM BAGI PENGUSAHA YANG
TIDAK MEMBUAT PERATURAN
PERUSAHAAN DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 27 Januari 2026



ROLAS JAKSON
NIM: 2402198005

KATA PENGANTAR

Terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena izin-Nya penulisan tesis ini dapat selesai dengan judul **“PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN”**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir dan sebagai syarat untuk menempuh Sidang Ujian Pascasarjana untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI). Judul Tesis ini berangkat dari isu-isu hukum terkait ketenagakerjaan dimana masih ada pelaku usaha yang belum membuat peraturan perusahaan sebagai kaidah hukum yang berlaku antara pelaku usaha dengan pekerjanya. Kiranya hasil penelitian dalam tesis ini dapat berkontribusi bagi perkembangan hukum dan menjadi informasi hukum bagi pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Dalam penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan, arahan serta dukungan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku pembimbing 2 serta penguji yang telah memberikan waktu dan perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih kepada guru besar, dosen dan staf akademisi Universitas Kristen Indonesia, yaitu:

1. Bapak Dr. David M.L Tobing, S.H., M.Kn selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia;
2. Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
4. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;

5. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA selaku penguji 3 dalam tesis penulis.
6. Seluruh Dosen dan staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
7. Bapak Pdt. Dr. Erastus Sabdono yang banyak memberikan masukan, ide dan pemikiran kepada penulis;
8. Istri penulis yang tercinta, Emmy Hutagalung dan anak-anak penulis Victoria Tampubolon dan Nicholas Tampubolon yang mendorong dan mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini;
9. Mama, kakak dan adik serta keluarga penulis yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;
10. Rekan-rekan penulis di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia serta semua pihak yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

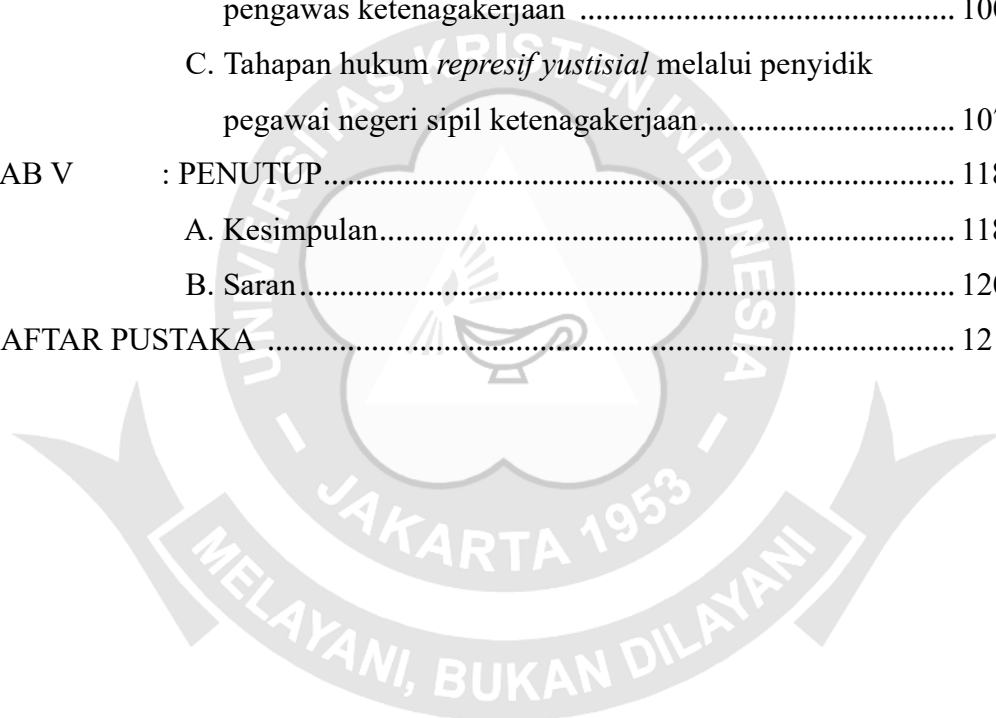
Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat terbuka terhadap masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang.

Bekasi, 27 Januari 2026

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir.....	iv
Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Ketenagakerjaan Dalam Suatu Negara.....	23
B. Tinjauan Ketenagakerjaan Dalam Hukum Positif	30
C. Tinjauan Pidana Denda Sebagai Sanksi	38
D. Tinjauan Ultimatum Remedium Dalam Ketenagakerjaan ..	45
E. Peraturan Perusahaan Sebagai Kaidah Hukum Otonomi .	50
BAB III : PIDANA DENDA BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN.	58
A. Rumusan norma pidana denda tidak dibuatnya Peraturan perusahaan oleh pengusaha.....	58
B. Kategori pengusaha sebagai korporasi yang dapat	

diberikan sanksi pidana denda karena tidak membuat Peraturan perusahaan	66
BAB IV: TAHAPAN HUKUM YANG HARUS DILALUI SEBELUM SANKSI PIDANA DENDA DIBERLAKUKAN BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN	90
A. Tahapan hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial	90
B. Tahapan hukum represif non yustisial melalui pengawas ketenagakerjaan	100
C. Tahapan hukum <i>represif yustisial</i> melalui penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan.....	107
BAB V : PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121



ABSTRAK

Judul Tesis : PIDANA DENDA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kata Kunci : Pidana Denda, *Ultimum Remedium*, Peraturan perusahaan

Kepatuhan pengusaha terhadap hukum tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan, melainkan juga berhubungan dengan ketenagakerjaan. Salah satu kepatuhan hukum yang wajib dilakukan oleh pengusaha adalah membuat Peraturan perusahaan (PP) terutama bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Penegakan hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan bersifat subsidiaritas, yaitu didahului dengan sanksi perdata atau sanksi administratif dan kemudian sanksi pidana sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kepastian hukum karena pengusaha adalah penggerak ekonomi suatu negara dengan kegiatan bisnis yang dilakukan dan berdampak ekonomi dan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada pengusaha tersebut. Kerjasama kolektif keduanya menciptakan kesejahteraan. Dalam teori tersebut, kesejahteraan pengusaha dan pekerja tidak efektif apabila pemerintah tidak dilibatkan. Oleh karena itu pemerintah berperan menerbitkan suatu Peraturan yang mengikat guna terjaminnya hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja secara berimbang, salah satunya mewajibkan pengusaha membuat Peraturan perusahaan. Apabila Peraturan tersebut dilanggar oleh pelaku, maka negara dapat bertindak secara preventif seperti perintah untuk mematuhi Peraturan tersebut, namun apabila perintah tersebut diabaikan maka negara dapat mengambil sikap represif sebagai pilihan terakhir dengan memberikan sanksi pidana. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang akan dialami oleh pengusaha apabila tidak membuat Peraturan perusahaan, yaitu pidana denda tetapi pidana denda tidak otomatis diberikan kepada pengusaha terhubung adanya asas hukum dalam pidana yang dikenal dengan *ultimum remedium*.

ABSTRACT

Thesis Title : CRIMINAL FINES AS AN ULTIMUM REMEDIUM FOR EMPLOYERS WHO DO NOT MAKE COMPANY REGULATIONS IN THE FIELD OF EMPLOYMENT

Keywords : Criminal Fines, Ultimum Remedium, Company Regulation

Entrepreneurs compliance with the law is not limited to the business they conduct but also relates to employment. One of the legal compliances that must be fulfilled by entrepreneurs is creating Company Regulations (CR), especially for entrepreneurs who employ at least 10 (ten) workers. Law enforcement related to employment is subsidiary in nature, meaning it is preceded by civil or administrative sanctions and then criminal sanctions as a last resort or ultimum remedium. The theories used in this study are the welfare state and legal certainty because entrepreneurs are economic drivers of a country through their business activities, which have economic impacts and provide protection for workers employed by them. Collective cooperation between both parties creates welfare. According to this theory, the welfare of entrepreneurs and workers is not effective if the government is not involved. Therefore, the government plays a role in issuing binding regulations to ensure the rights and obligations of employers and workers are balanced, one of which is requiring employers to create Company Regulations. If these regulations are violated by the parties involved, the state can act preventively, such as by issuing orders to comply with the regulations; however, if such orders are ignored, the state can take a repressive stance as a last resort by imposing criminal sanctions. The research method in this thesis uses a normative research method, with data sources consisting of secondary data that include primary legal materials, namely the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 on Manpower and the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 on Job Creation into Law and secondary legal materials such as legal expert opinions, and tertiary legal materials which is a legal dictionary. The purpose of this research writing is to understand the legal consequences that entrepreneurs will face if they do not create Company Regulations, namely criminal fines, but criminal fines are not automatically imposed on entrepreneurs due to the legal principle in criminal law known as ultimum remedium.